JIRK
Journal of Innovation Research and Knowledge
Vol.6 No.6, Nopember 2026
https://doi.org/10.53625/jirk.v6i6. 13447

Tata Kelola Implementasi Program Gratispol Dalam Mewujudkan Pemerataan Akses Pendidikan Tinggi Di Provinsi Kalimantan Timur

Marchela Marlein Sanger[1], Iman Surya[2], Jauchar B[3]
[1,2,3]Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia
Penulis Korespondensi: marchelamarlein12@gmail.com

Received: 01/09/2026 | Accepted: 01/10/2026 | Publication: 05/11/2026

Abstract: *Equitable access to higher education is one of the challenges of regional human resource development. Economic barriers, geographical differences, limited information, and unequal access to educational services can leave opportunities to pursue higher education unequal. The Provincial Government of East Kalimantan has responded to this issue through the Gratispol Program, an education financing policy for university students. This study aims to analyze the governance of the Gratispol Program's implementation in achieving equitable access to higher education in East Kalimantan Province. A qualitative approach with a descriptive-analytical method was used through a documentary study of regulations, statistical data, government documents, official Gratispol publications, and relevant academic literature. The analysis draws on George C. Edwards III's policy implementation framework, covering communication, resources, disposition, and bureaucratic structure, enriched with an equity perspective on educational services. Statistics Indonesia (BPS) data show that the Gross Enrollment Ratio for higher education in East Kalimantan reached 40.44 percent in 2025, higher than the national average of 32.89 percent, yet most of the population of higher-education age is still not enrolled. The implementation of Gratispol shows a significant expansion of coverage: by the third disbursement stage of 2026, 63,603 students from 52 higher education institutions had received assistance with a total budget of IDR 288.5 billion. The analysis indicates that expanded financing has strengthened financial access, but substantive equity still depends on targeting accuracy, data integration, communication quality, administrative capacity, and the government's ability to reach groups facing greater access barriers. Gratispol therefore needs to be developed not merely as a tuition-waiver instrument but as needs-based, transparent, adaptive, and outcome-oriented education policy governance for human resource development.*

Keywords*:* Gratispol; Governance; Policy Implementation; Higher Education; Equitable Access

Copyright © 2026, The Author(s).
This is an open-access article under the CC–BY-SA license.

How to Cite: Sanger, M. M., Surya, I., & B, J. (2026). Tata Kelola Implementasi Program Gratispol Dalam Mewujudkan Pemerataan Akses Pendidikan Tinggi Di Provinsi Kalimantan Timur. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, *6*(6), 3057-3070. https://doi.org/10.53625/jirk.v6i6.13447

PENDAHULUAN

Pendidikan tinggi memiliki posisi strategis dalam pembangunan sumber daya manusia. Perubahan kebutuhan dunia kerja, perkembangan teknologi, dan transformasi struktur ekonomi menyebabkan masyarakat semakin membutuhkan kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan lanjutan. Karena itu, akses terhadap pendidikan tinggi tidak lagi semata-mata menjadi persoalan individual, tetapi telah menjadi bagian dari agenda

pembangunan daerah.

Pemerintah daerah memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa kemampuan ekonomi keluarga tidak menjadi satu-satunya faktor yang menentukan seseorang dapat atau tidak dapat melanjutkan pendidikan tinggi. Intervensi pembiayaan menjadi salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mengurangi hambatan tersebut.

Namun, persoalan akses pendidikan tinggi tidak hanya berkaitan dengan biaya kuliah. Mahasiswa juga menghadapi biaya hidup, transportasi, perangkat pembelajaran, internet, serta biaya lain yang berbeda menurut wilayah dan kondisi sosial ekonomi. Oleh sebab itu, kebijakan pendidikan yang disebut "gratis" perlu dianalisis tidak hanya dari sisi pembiayaan, tetapi juga dari kemampuan tata kelolanya dalam menjangkau kelompok masyarakat yang memiliki hambatan paling besar.

Persoalan tersebut relevan bagi Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki karakteristik wilayah yang beragam. Provinsi ini memiliki pusat-pusat pendidikan tinggi di kawasan perkotaan sekaligus daerah dengan kondisi geografis yang lebih sulit dijangkau. Perbedaan tersebut menciptakan variasi kesempatan pendidikan antarwilayah.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi Kalimantan Timur pada 2025 mencapai 40,44 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan APK perguruan tinggi nasional sebesar 32,89 persen. Namun, angka tersebut sekaligus menunjukkan bahwa sekitar enam dari sepuluh penduduk pada kelompok usia perguruan tinggi belum tercatat dalam pendidikan tinggi berdasarkan indikator APK. (Badan Pusat Statistik Indonesia)

Data tersebut perlu dibaca secara hati-hati. APK tidak sama dengan persentase penduduk yang pasti tidak kuliah karena indikator tersebut juga memasukkan mahasiswa di luar kelompok umur 19–23 tahun. Namun, indikator tersebut tetap memberikan gambaran bahwa partisipasi pendidikan tinggi belum bersifat universal.

Dalam konteks inilah Program Gratispol menjadi relevan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2025 tentang Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa pada Perguruan Tinggi. Peraturan tersebut ditetapkan pada 16 Juni 2025 dan berlaku sebagai dasar baru penyelenggaraan bantuan biaya pendidikan mahasiswa, sekaligus mencabut Pergub Nomor 15 Tahun 2020 dan Pergub Nomor 16 Tahun 2020. (JDIH Provinsi Kalimantan Timur)

Regulasi tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah memperkuat dasar hukum dan desain kebijakan pembiayaan pendidikan tinggi.

Program Gratispol kemudian berkembang dengan berbagai skema. Situs resmi program mencantumkan Gratispol Dalam Daerah, Afirmasi, Kerja Sama, Luar Daerah, dan Luar Negeri. Sistem pelayanan juga dikembangkan secara digital untuk pendaftaran, pengunggahan dokumen, verifikasi, dan penyampaian informasi. (Pendidikan Gratis Pol Kaltimprov)

Perkembangan program pada 2026 menunjukkan perluasan yang cukup besar. Hingga pencairan tahap III, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melaporkan bahwa 63.603 mahasiswa telah menerima bantuan dengan total anggaran Rp288,5 miliar. Penerima berasal dari 52 perguruan tinggi, yang terdiri atas tujuh perguruan tinggi negeri dan 45 perguruan tinggi swasta. (Diskominfo Kaltimprov)

JIRK
Journal of Innovation Research and Knowledge
Vol.6 No.6, Nopember 2026
https://doi.org/10.53625/jirk.v6i6. 13447

Sebelumnya, pada pencairan tahap pertama dan kedua 2026, bantuan telah diberikan kepada 48.676 mahasiswa dengan total dana Rp220,65 miliar. Pada tahap kedua saja, sebanyak 27.548 mahasiswa dari 51 perguruan tinggi menerima bantuan sebesar Rp117,55 miliar. (Diskominfo Kaltimprov)

Skala tersebut menunjukkan bahwa Gratispol bukan lagi kebijakan dengan cakupan terbatas. Program telah menjadi salah satu instrumen pembiayaan pendidikan dengan jangkauan yang besar di tingkat provinsi.

Namun, semakin besar skala program, semakin kompleks pula persoalan tata kelolanya.

Ketika jumlah penerima meningkat, pemerintah harus memastikan validitas data mahasiswa, ketepatan sasaran, koordinasi dengan perguruan tinggi, ketepatan waktu pembayaran, pengawasan penggunaan anggaran, dan penyelesaian masalah administratif.

Dengan demikian, persoalan utama bukan lagi sekadar apakah pemerintah menyediakan anggaran, tetapi **bagaimana anggaran tersebut diterjemahkan menjadi pelayanan pendidikan yang adil dan dapat diakses oleh kelompok yang membutuhkan**.

Hal tersebut menjadi penting karena pemerataan tidak selalu berarti setiap orang memperoleh perlakuan yang identik. Dalam perspektif *equity*, individu dengan hambatan yang berbeda dapat membutuhkan bentuk dukungan yang berbeda pula.

Mahasiswa dari Samarinda yang tinggal dekat kampus memiliki kondisi yang berbeda dengan mahasiswa dari daerah pedalaman yang harus berpindah tempat tinggal. Mahasiswa dari keluarga berpenghasilan tinggi memiliki kondisi berbeda dengan mahasiswa dari keluarga berpenghasilan rendah. Demikian pula mahasiswa yang memiliki akses internet stabil berbeda dengan mahasiswa dari wilayah dengan konektivitas terbatas.

Jika tata kelola program hanya menggunakan satu pendekatan administratif tanpa memperhatikan variasi tersebut, maka kebijakan yang dirancang untuk pemerataan dapat menghasilkan manfaat yang tidak sepenuhnya merata.

Pada 2026, pemerintah juga memperluas pembiayaan Gratispol. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyatakan bahwa bantuan UKT tidak lagi terbatas pada mahasiswa baru, tetapi diperluas kepada mahasiswa pada semester lanjutan yang memenuhi persyaratan. (Diskominfo Kaltimprov)

Perubahan tersebut penting karena persoalan akses pendidikan tinggi tidak selesai ketika mahasiswa berhasil masuk perguruan tinggi. Mahasiswa juga harus mampu mempertahankan keberlanjutan studinya sampai lulus.

Dengan demikian, terdapat perubahan orientasi yang menarik untuk dikaji: dari **akses masuk pendidikan tinggi** menuju **keberlanjutan pendidikan tinggi**.

Penelitian ini menganalisis tata kelola implementasi Program Gratispol dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan tinggi di Provinsi Kalimantan Timur dengan memusatkan perhatian pada komunikasi kebijakan, sumber daya, disposisi pelaksana, struktur birokrasi, serta prinsip pemerataan akses.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi merupakan tahap ketika kebijakan yang telah dirumuskan diterjemahkan menjadi tindakan administratif dan pelayanan publik.

Pressman dan Wildavsky (1984) menjelaskan bahwa implementasi merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak keputusan, aktor, dan hubungan kelembagaan.

Dalam konteks Gratispol, kebijakan tidak berhenti pada keputusan pemerintah provinsi. Implementasinya melibatkan perangkat daerah, perguruan tinggi, mahasiswa, dan sistem administrasi yang saling terhubung.

Karena itu, kualitas implementasi sangat menentukan apakah tujuan kebijakan dapat dicapai.

2.2 Model Implementasi George C. Edwards III

Edwards III (1980) menjelaskan empat faktor utama implementasi kebijakan:

1. komunikasi;
2. sumber daya;
3. disposisi;
4. struktur birokrasi.

Komunikasi menentukan apakah kebijakan dipahami oleh pelaksana dan kelompok sasaran.

Sumber daya meliputi anggaran, SDM, fasilitas, informasi, dan teknologi.

Disposisi berkaitan dengan sikap dan komitmen pelaksana.

Struktur birokrasi berkaitan dengan pembagian kewenangan, prosedur, dan mekanisme kerja.

Keempat faktor tersebut relevan untuk menganalisis tata kelola Gratispol.

2.3 Governance dalam Pelayanan Pendidikan

Konsep *governance* melihat penyelenggaraan pelayanan publik sebagai proses yang melibatkan berbagai aktor dan institusi.

Dalam program pembiayaan pendidikan, pemerintah tidak bekerja sendiri.

Perguruan tinggi memiliki fungsi administratif.

Mahasiswa merupakan penerima sekaligus pengguna layanan.

Pemerintah provinsi berfungsi sebagai regulator dan penyedia pembiayaan.

Karena itu, keberhasilan program membutuhkan koordinasi lintas institusi.

2.4 Pemerataan dan Equity

Pemerataan akses tidak selalu berarti pembagian bantuan yang sama kepada semua orang.

Prinsip *equity* mengakui bahwa kelompok masyarakat memiliki titik awal dan hambatan yang berbeda.

Karena itu, kebijakan afirmatif perlu mempertimbangkan kebutuhan penerima.

Dalam konteks Gratispol, pemerataan dapat dianalisis melalui:

- keterjangkauan informasi;
- akses pendaftaran;
- ketepatan sasaran;

ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)

- keterjangkauan biaya pendidikan;
- keberlanjutan studi;
- dan distribusi manfaat antarwilayah.

2.5 Kerangka Konseptual

Kerangka analisis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

Program Gratispol
↓
Komunikasi
Sumber daya
Disposisi
Struktur birokrasi
↓
Tata kelola implementasi
↓
Akses pendidikan tinggi
↓
Keberlanjutan studi
↓
Pemerataan kesempatan
↓
Peningkatan kualitas SDM Kalimantan Timur

Kerangka tersebut menempatkan tata kelola sebagai penghubung antara kebijakan pembiayaan dan tujuan pemerataan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis.

Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada proses implementasi, mekanisme pelayanan, koordinasi kelembagaan, dan persoalan pemerataan yang tidak dapat sepenuhnya dijelaskan melalui indikator kuantitatif.

Objek penelitian adalah Program Gratispol Pendidikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan fokus pada bantuan biaya pendidikan mahasiswa pada perguruan tinggi.

Data penelitian diperoleh dari Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2025, publikasi resmi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, situs resmi Pendidikan Gratispol, data Badan Pusat Statistik, dokumen perguruan tinggi, serta literatur ilmiah mengenai implementasi kebijakan dan pemerataan pendidikan. (JDIH Provinsi Kalimantan Timur)

Analisis dilakukan menggunakan kerangka Edwards III dengan empat dimensi utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Analisis kemudian dipertajam dengan perspektif *equity* untuk melihat apakah implementasi program memberikan kesempatan yang relatif adil kepada masyarakat dengan karakteristik sosial, ekonomi, dan geografis yang berbeda.

Triangulasi sumber digunakan dengan membandingkan regulasi, data statistik,

publikasi resmi program, serta dokumen pemerintah.

Penelitian ini menggunakan data sekunder dan tidak mengklaim hasil wawancara atau pengalaman individual mahasiswa yang tidak tersedia dalam sumber resmi. Oleh karena itu, kesimpulan diarahkan pada tata kelola kebijakan dan mekanisme implementasi, bukan pada pengukuran kausal terhadap perubahan pendapatan atau status sosial penerima.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gratispol sebagai Instrumen Pemerataan Pendidikan Tinggi

Program Gratispol memiliki posisi strategis karena pemerintah daerah secara langsung melakukan intervensi terhadap salah satu hambatan utama pendidikan tinggi, yaitu pembiayaan.

Dasar hukum utama program saat ini adalah Pergub Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2025 tentang Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa pada Perguruan Tinggi. Regulasi tersebut menggantikan dua peraturan gubernur sebelumnya yang mengatur bantuan biaya pendidikan. (JDIH Provinsi Kalimantan Timur)

Perubahan dasar hukum tersebut menunjukkan bahwa program tidak hanya dipertahankan, tetapi juga mengalami penataan kembali.

Dalam konteks kebijakan publik, perubahan regulasi merupakan hal penting karena skala program yang semakin besar membutuhkan dasar administratif yang lebih jelas.

Situs resmi Gratispol menunjukkan bahwa program mencakup beberapa kategori, antara lain program dalam daerah, afirmasi, kerja sama, luar daerah, dan luar negeri. (Pendidikan Gratis Pol Kaltimprov)

Variasi tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah mulai mengembangkan pendekatan yang lebih beragam untuk menjangkau kebutuhan mahasiswa.

4.2 Besarnya Skala Implementasi

Skala implementasi Gratispol pada 2026 menunjukkan perubahan signifikan.

Hingga tahap III pencairan, pemerintah melaporkan 63.603 mahasiswa telah menerima bantuan dengan nilai Rp288,5 miliar. Penerima berasal dari 52 perguruan tinggi yang terdiri atas tujuh PTN dan 45 PTS. (Diskominfo Kaltimprov)

Jika dibandingkan dengan tahap pertama dan kedua, skala tersebut menunjukkan perluasan cakupan secara bertahap.

Pada tahap pertama 2026, sebanyak 21.128 mahasiswa menerima bantuan dengan nilai sekitar Rp103,1 miliar. Tahap kedua menambah 27.548 mahasiswa dengan nilai Rp117,55 miliar. Akumulasi dua tahap mencapai 48.676 mahasiswa dengan nilai Rp220,65 miliar. (Diskominfo Kaltimprov)

Data tersebut memperlihatkan kemampuan administratif pemerintah untuk mengelola program dalam skala besar.

Namun, skala juga menghasilkan tantangan baru.

Semakin banyak mahasiswa yang dikelola, semakin kompleks proses:

pendaftaran → verifikasi → validasi → penetapan → pencairan → monitoring.

Kesalahan kecil pada salah satu tahap dapat berdampak pada penerima dalam jumlah besar.

ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)

JIRK
Journal of Innovation Research and Knowledge
Vol.6 No.6, Nopember 2026
https://doi.org/10.53625/jirk.v6i6. 13447

4.3 Komunikasi Kebijakan

Komunikasi merupakan salah satu unsur penting dalam implementasi Gratispol.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyatakan bahwa sosialisasi dilakukan kepada perguruan tinggi dan mahasiswa agar mekanisme program dapat dipahami oleh penerima manfaat. (Kaltim Provinsi)

Sementara itu, sistem resmi Gratispol menyediakan informasi mengenai pendaftaran, panduan, dokumen, serta pengumuman penerima. (Pendidikan Gratis Pol Kaltimprov)

Digitalisasi memberikan keuntungan berupa akses informasi yang lebih cepat.

Namun, komunikasi digital tetap memiliki keterbatasan.

Tidak semua mahasiswa memiliki kemampuan yang sama dalam memahami persyaratan administratif.

Karena itu, komunikasi yang efektif tidak cukup hanya dengan mengunggah informasi.

Informasi harus:

- jelas;
- mudah ditemukan;
- konsisten;
- menggunakan bahasa yang mudah dipahami;
- menyediakan mekanisme bantuan;
- dan disampaikan melalui berbagai kanal.

Dengan demikian, komunikasi perlu dipandang sebagai bagian dari keadilan akses.

4.4 Digitalisasi dan Akses Administratif

Gratispol telah menggunakan sistem digital dalam proses pengajuan bantuan.

Situs resmi program menyebutkan bahwa pendaftaran dan seleksi dilakukan secara digital, mulai dari pengisian biodata hingga pengunggahan dokumen dan verifikasi data. (Pendidikan Gratis Pol Kaltimprov)

Digitalisasi memberikan sejumlah keuntungan.

Pertama, mengurangi kebutuhan tatap muka.

Kedua, mempercepat pengumpulan data.

Ketiga, memudahkan dokumentasi.

Keempat, memungkinkan proses verifikasi lebih terstruktur.

Namun, terdapat risiko eksklusi digital.

Mahasiswa dari wilayah dengan koneksi internet yang buruk dapat mengalami hambatan yang tidak dialami mahasiswa di pusat kota.

Karena itu, sistem digital perlu dilengkapi mekanisme pendampingan.

Pemerataan tidak akan tercapai jika akses terhadap teknologi justru menjadi prasyarat tersembunyi untuk memperoleh hak atas bantuan pendidikan.

4.5 Sumber Daya dan Kapasitas Fiskal

Program dalam skala puluhan ribu mahasiswa membutuhkan sumber daya yang besar.

Pada 2026, pemerintah menargetkan Gratispol menjangkau 158.981 mahasiswa dengan alokasi anggaran sekitar Rp1,377 triliun. (Diskominfo Kaltimprov)

Anggaran tersebut menunjukkan besarnya komitmen fiskal pemerintah daerah

terhadap pendidikan tinggi.

Namun, besarnya anggaran juga menimbulkan tuntutan akuntabilitas.

Pemerintah perlu memastikan:

anggaran tersedia → data akurat → penerima tepat → pembayaran tepat waktu → manfaat berkelanjutan.

Dengan demikian, kapasitas fiskal hanya merupakan salah satu unsur.

Kapasitas administratif sama pentingnya.

Program dengan anggaran besar tetapi sistem administrasi yang lemah tetap berpotensi menghasilkan keterlambatan dan ketidaktepatan.

4.6 Verifikasi dan Validasi Data

Salah satu aspek penting tata kelola Gratispol adalah validasi data penerima.

Pada awal 2026, pemerintah menyampaikan bahwa data mahasiswa perlu diverifikasi dan divalidasi, termasuk data KTP dan usia, sebelum proses penyaluran dilanjutkan. (Diskominfo Kaltimprov)

Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah menghadapi kebutuhan untuk memastikan kesesuaian data administratif.

Persoalan data menjadi semakin penting ketika jumlah penerima mencapai puluhan ribu.

Kesalahan data dapat menghasilkan dua persoalan sekaligus.

Pertama, **inclusion error**, yaitu bantuan diterima pihak yang tidak memenuhi kriteria.

Kedua, **exclusion error**, yaitu masyarakat yang sebenarnya memenuhi kriteria justru tidak memperoleh bantuan.

Dari perspektif pemerataan, *exclusion error* sangat penting diperhatikan karena langsung berhubungan dengan tujuan afirmasi.

4.7 Perguruan Tinggi sebagai Aktor Implementasi

Gratispol memperlihatkan bahwa perguruan tinggi bukan hanya penerima transfer dana.

Perguruan tinggi menjadi bagian dari sistem implementasi.

Hal tersebut terlihat dari proses verifikasi mahasiswa dan penyaluran bantuan melalui institusi pendidikan.

Pada pencairan tahap kedua 2026, misalnya, dana disalurkan kepada 51 perguruan tinggi yang terdiri atas tujuh PTN dan 44 PTS. (Diskominfo Kaltimprov)

Hubungan tersebut menunjukkan adanya *shared implementation*.

Pemerintah menetapkan kebijakan dan menyediakan pembiayaan.

Perguruan tinggi menyediakan data dan memastikan status akademik mahasiswa.

Mahasiswa memenuhi persyaratan dan mengikuti prosedur.

Karena itu, kualitas koordinasi antaraktor menjadi sangat menentukan.

4.8 Perluasan dari Mahasiswa Baru ke Semua Semester

Salah satu perkembangan penting Gratispol adalah perluasan penerima.

Pada 2025, pemerintah menyampaikan bahwa program pendidikan tinggi pada tahun awal kepemimpinan masih diberikan kepada mahasiswa baru. Pemerintah kemudian menyatakan bahwa mulai 2026 pembiayaan UKT diperluas kepada mahasiswa pada seluruh

semester yang memenuhi ketentuan. (Setda Prov. Kaltim)

Perubahan tersebut memiliki implikasi substantif.

Kebijakan tidak lagi hanya menjawab persoalan:

"Bagaimana membantu masyarakat masuk perguruan tinggi?"

tetapi juga:

"Bagaimana memastikan mahasiswa dapat bertahan sampai menyelesaikan pendidikan?"

Ini merupakan perubahan penting dalam orientasi kebijakan.

Akses pendidikan tinggi seharusnya memang tidak dipahami hanya sebagai akses masuk.

Akses yang bermakna membutuhkan **retensi dan keberlanjutan studi**.

4.9 Pemerataan Substantif dan Persoalan Geografis

Kalimantan Timur memiliki karakter wilayah yang beragam.

Mahasiswa dari Samarinda, Balikpapan, atau kota lain dengan konsentrasi perguruan tinggi menghadapi kondisi akses yang berbeda dengan mahasiswa dari kabupaten yang lebih jauh dari pusat pendidikan.

Karena itu, pembebasan UKT belum tentu menghilangkan seluruh hambatan pendidikan.

Mahasiswa yang harus tinggal jauh dari keluarga tetap menghadapi:

- biaya tempat tinggal;
- makanan;
- transportasi;
- perangkat digital;
- internet;
- kebutuhan akademik.

Persoalan tersebut menunjukkan bahwa pemerataan pendidikan tinggi harus dilihat dalam perspektif biaya total pendidikan.

Gratispol secara langsung mengurangi beban UKT atau biaya pendidikan sesuai skema program, tetapi tidak berarti seluruh biaya kehidupan mahasiswa otomatis hilang.

Karena itu, evaluasi program perlu memperhatikan karakteristik kebutuhan mahasiswa berdasarkan wilayah asal.

4.10 Program Afirmasi sebagai Mekanisme Equity

Situs resmi Gratispol mencantumkan skema afirmasi sebagai salah satu kategori program. Pada 2026, pemerintah juga mengumumkan calon penerima Gratispol jalur afirmasi. (Pendidikan Gratis Pol Kaltimprov)

Keberadaan skema afirmasi penting karena pemerataan tidak dapat dilakukan dengan pendekatan yang sepenuhnya seragam.

Kelompok yang memiliki hambatan struktural membutuhkan mekanisme dukungan yang lebih spesifik.

Namun, efektivitas afirmasi tetap bergantung pada bagaimana kelompok sasaran didefinisikan dan diverifikasi.

Jika kriteria terlalu sempit, kelompok yang membutuhkan dapat tidak terjangkau.

Jika terlalu luas, sumber daya program dapat tersebar sehingga dukungan kepada

kelompok paling rentan menjadi kurang optimal.

Karena itu, kualitas data sosial ekonomi menjadi penting dalam tata kelola afirmasi.

4.11 Perluasan Program dan Tantangan Akuntabilitas

Semakin besar jumlah penerima, semakin besar pula tuntutan akuntabilitas.

Pemerintah harus mampu menjelaskan:

- siapa penerima;
- berdasarkan kriteria apa;
- berapa anggaran;
- bagaimana proses verifikasi;
- kapan pembayaran dilakukan;
- bagaimana masalah diselesaikan;
- dan apa hasil program.

Akuntabilitas tidak hanya berarti laporan keuangan.

Akuntabilitas juga mencakup **akuntabilitas hasil**.

Pemerintah perlu mengetahui apakah penerima tetap kuliah, menyelesaikan studi, dan memperoleh manfaat sebagaimana tujuan program.

Dengan demikian, evaluasi Gratispol sebaiknya berkembang dari *input-output evaluation* menuju *outcome evaluation*.

4.12 Dari Pembiayaan menuju Investasi SDM

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menempatkan pendidikan sebagai salah satu fondasi pembangunan sumber daya manusia. Pemerintah menyatakan bahwa Gratispol diarahkan untuk memperluas kesempatan pendidikan sekaligus mendukung peningkatan kualitas SDM. (Setda Prov. Kaltim)

Perspektif tersebut dapat diperkuat melalui kerangka *human capital*.

Beasiswa atau bantuan pendidikan merupakan investasi.

Mahasiswa memperoleh pendidikan.

Pendidikan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan.

Keterampilan meningkatkan peluang produktivitas.

Produktivitas kemudian berpotensi memberikan kontribusi terhadap perekonomian dan pembangunan daerah.

Dengan demikian:

Gratispol → akses → pendidikan → kompetensi → produktivitas → SDM → pembangunan daerah.

Namun, rantai tersebut membutuhkan waktu.

Karena itu, evaluasi keberhasilan Gratispol tidak seharusnya hanya dilakukan berdasarkan pencairan anggaran dalam satu tahun.

Dampak pembangunan manusia baru dapat terlihat melalui evaluasi jangka menengah dan panjang.

FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT

5.1 Faktor Pendukung

Pertama, terdapat dasar hukum yang jelas melalui Pergub Nomor 24 Tahun 2025. (JDIH Provinsi Kalimantan Timur)

ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)

JIRK
Journal of Innovation Research and Knowledge
Vol.6 No.6, Nopember 2026
https://doi.org/10.53625/jirk.v6i6. 13447

Kedua, pemerintah menyediakan dukungan fiskal yang besar untuk memperluas cakupan program. Pada 2026, target anggaran Gratispol dilaporkan sekitar Rp1,377 triliun. (Diskominfo Kaltimprov)

Ketiga, program telah memiliki sistem layanan digital yang memungkinkan pendaftaran dan verifikasi dilakukan secara terintegrasi. (Pendidikan Gratis Pol Kaltimprov)

Keempat, terdapat kerja sama dengan banyak perguruan tinggi negeri dan swasta.

Kelima, cakupan program semakin luas, termasuk skema dalam daerah, luar daerah, afirmasi, kerja sama, dan kategori khusus. (Pendidikan Gratis Pol Kaltimprov)

Keenam, mulai 2026 program diperluas kepada mahasiswa pada semester lanjutan yang memenuhi persyaratan sehingga keberlanjutan studi menjadi bagian yang lebih kuat dalam kebijakan. (Diskominfo Kaltimprov)

5.2 Faktor Penghambat

Pertama, skala penerima yang besar meningkatkan kompleksitas verifikasi dan validasi data.

Kedua, perbedaan geografis dapat menghasilkan perbedaan kemampuan mahasiswa mengakses layanan digital.

Ketiga, koordinasi antara pemerintah dan puluhan perguruan tinggi membutuhkan sistem informasi yang konsisten.

Keempat, pembebasan biaya kuliah tidak otomatis menghapus biaya hidup mahasiswa.

Kelima, pemerataan manfaat dapat menghadapi risiko *exclusion error* apabila kelompok dengan hambatan administratif atau geografis tidak terjangkau.

Keenam, evaluasi program masih perlu diperkuat pada tingkat *outcome*, khususnya keberlanjutan studi, kelulusan, dan kontribusi lulusan terhadap pembangunan daerah.

IMPLIKASI KEBIJAKAN

Pertama, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur perlu mengembangkan **satu basis data Gratispol terintegrasi** yang menghubungkan data pemerintah, perguruan tinggi, dan mahasiswa.

Kedua, sistem verifikasi perlu menggabungkan data kependudukan, status akademik, kondisi ekonomi, dan karakteristik wilayah untuk meningkatkan ketepatan sasaran.

Ketiga, pemerintah perlu mengembangkan mekanisme **pendampingan administratif** bagi mahasiswa dari wilayah dengan keterbatasan akses internet maupun literasi digital.

Keempat, evaluasi program perlu menggunakan indikator yang lebih luas daripada jumlah penerima dan jumlah anggaran tersalurkan.

Indikator dapat mencakup:

Dimensi	Indikator
Input	Anggaran
Proses	Kecepatan verifikasi
Output	Jumlah penerima
Outcome	Keberlanjutan studi
Outcome	Kelulusan

Dimensi	Indikator
Outcome	Ketepatan sasaran
Impact	Peningkatan kualitas SDM

Kelima, pemerintah perlu melakukan *tracer study* terhadap alumni Gratispol.

Data alumni dapat digunakan untuk mengetahui:

- bidang pekerjaan;
- lokasi pekerjaan;
- kesesuaian pekerjaan dengan bidang studi;
- kontribusi kepada daerah;
- dan tingkat mobilitas sosial.

Keenam, skema afirmasi perlu diperkuat agar kelompok dengan hambatan ekonomi dan geografis yang lebih besar tidak kalah bersaing dalam mekanisme administratif.

Ketujuh, pemerintah perlu memperkuat mekanisme pengaduan satu pintu sehingga persoalan mahasiswa tidak terfragmentasi antara pemerintah dan perguruan tinggi.

Kedelapan, kerja sama dengan perguruan tinggi perlu dikembangkan dari sekadar mekanisme pembayaran menjadi kerja sama pembangunan SDM yang mencakup magang, riset, pengembangan kompetensi, dan penyerapan lulusan.

Kesembilan, evaluasi Gratispol perlu dilakukan secara berkala dan dipublikasikan secara transparan agar masyarakat dapat mengetahui perkembangan program dan hasil yang dicapai.

KESIMPULAN

Program Gratispol merupakan salah satu bentuk intervensi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk mengurangi hambatan pembiayaan pendidikan tinggi. Dasar hukum melalui Pergub Nomor 24 Tahun 2025 memberikan kerangka regulatif bagi pelaksanaan bantuan biaya pendidikan mahasiswa. (JDIH Provinsi Kalimantan Timur)

Implementasi program telah berkembang dalam skala yang besar. Hingga tahap III pencairan 2026, sebanyak 63.603 mahasiswa dari 52 perguruan tinggi telah menerima bantuan dengan total anggaran Rp288,5 miliar. (Diskominfo Kaltimprov) Skala tersebut menunjukkan bahwa Gratispol telah menjadi instrumen penting dalam kebijakan pendidikan tinggi Kalimantan Timur.

Namun, besarnya cakupan tidak secara otomatis berarti pemerataan telah tercapai.

Pemerataan pendidikan tinggi memiliki dimensi yang lebih luas daripada pembebasan UKT. Perbedaan kondisi ekonomi, geografis, akses digital, biaya hidup, informasi, dan kemampuan administratif tetap dapat menciptakan kesenjangan dalam pemanfaatan program.

Dari perspektif implementasi Edwards III, keberhasilan Gratispol sangat dipengaruhi oleh komunikasi kebijakan yang jelas, sumber daya yang memadai, komitmen pelaksana, serta struktur birokrasi yang mampu mengelola hubungan antara pemerintah dan perguruan tinggi.

Digitalisasi memberikan peluang meningkatkan efisiensi dan transparansi, tetapi harus disertai mekanisme pendampingan agar tidak menghasilkan eksklusi administratif

bagi masyarakat dengan keterbatasan akses digital.

Perluasan program pada 2026 kepada mahasiswa semester lanjutan juga menunjukkan perubahan orientasi dari sekadar memperluas akses masuk menuju upaya menjaga keberlanjutan pendidikan tinggi. (Diskominfo Kaltimprov)

Dengan demikian, tantangan utama Gratispol ke depan bukan hanya memperbesar jumlah penerima, tetapi memastikan bahwa manfaat program benar-benar menjangkau kelompok yang membutuhkan dan menghasilkan keberlanjutan pendidikan.

Program perlu dikembangkan dari **kebijakan pembiayaan pendidikan menjadi sistem tata kelola pembangunan sumber daya manusia**.

Keberhasilan Gratispol pada akhirnya tidak cukup diukur dari berapa rupiah yang dikeluarkan pemerintah atau berapa mahasiswa yang menerima bantuan. Ukuran yang lebih substantif adalah sejauh mana program mampu mengurangi kesenjangan kesempatan, membantu mahasiswa menyelesaikan pendidikan, meningkatkan kompetensi, dan menghasilkan sumber daya manusia yang dapat berkontribusi terhadap pembangunan Kalimantan Timur.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. (2025). *Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) Menurut Provinsi, 2025*. Jakarta: Badan Pusat Statistik. (Badan Pusat Statistik Indonesia)

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur. (2025). *Provinsi Kalimantan Timur dalam Angka 2025*. Samarinda: BPS Provinsi Kalimantan Timur.

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur. (2025). *Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur 2025*. Samarinda: BPS Provinsi Kalimantan Timur.

Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington, DC: Congressional Quarterly Press.

Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton: Princeton University Press.

OECD. (2024). *Education at a Glance 2024: OECD Indicators*. Paris: OECD Publishing.

Pressman, J. L., & Wildavsky, A. (1984). *Implementation: How Great Expectations in Washington Are Dashed in Oakland*. Berkeley: University of California Press.

Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. New York: Oxford University Press.

United Nations Development Programme. (2024). *Human Development Report 2023/2024*. New York: UNDP.

World Bank. (2018). *World Development Report 2018: Learning to Realize Education's Promise*. Washington, DC: World Bank.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. (2025). *Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2025 tentang Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa pada Perguruan Tinggi*. Samarinda: JDIH Provinsi Kalimantan Timur. (JDIH Provinsi Kalimantan Timur)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. (2026). *Pendidikan Gratispol: Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa Kaltim*. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. (Pendidikan Gratis Pol Kaltimprov)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. (2026). *Gratispol Cair Rp288 Miliar, 63 Ribu*

Mahasiswa Kaltim Terima Manfaat. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur. (Diskominfo Kaltimprov)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. (2026). *Pemprov Kaltim Salurkan Rp220 Miliar Dana Gratispol ke Kampus, Ringankan Biaya Kuliah Mahasiswa*. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur. (Diskominfo Kaltimprov)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. (2026). *Mulai 2026, Pemprov Kaltim Gratiskan UKT Mahasiswa di Semua Semester*. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur. (Diskominfo Kaltimprov)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. (2026). *Evaluasi Tata Kelola Gratispol, Pemprov Kaltim Terus Perkuat Akses Pendidikan*. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. (Kaltim Provinsi)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. (2026). *Gubernur Harum Tegaskan Komitmen Bangun SDM Unggul melalui Pendidikan Gratis*. Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. (Setda Prov. Kaltim)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. (2026). *Pengumuman Calon Penerima Gratispol Jalur Afirmasi*. Pendidikan Gratispol. (Pendidikan Gratis Pol Kaltimprov)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. (2026). *Pengumuman Calon Penerima Gratispol Mahasiswa Program Luar Daerah, Khusus Tenaga Pendidik, Khusus Eselon II, dan Afirmasi*. Pendidikan Gratispol. (Pendidikan Gratis Pol Kaltimprov)

ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)